

## PEKERJAAN RUMAH MASALAH LINGKUNGAN HIDUP BAGI PRESIDEN TERPILIH

Sri Nurhayati Qodriyatun\*

### Abstrak

*Pemilihan umum presiden (pilpres) adalah momen penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengarahkan pembangunan ke depan yang lebih baik. Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian masyarakat. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana isu lingkungan hidup menjadi fokus bahasan dalam pilpres 2024 dan menjawab permasalahan lingkungan hidup Indonesia saat ini. Saat ini Indonesia dihadapkan masalah perubahan iklim, kerusakan hutan, kerusakan sumber daya laut, polusi udara, krisis air, dan persampahan. Namun, misi dan agenda pembangunan yang ditawarkan pasangan capres-cawapres 2023 belum sepenuhnya memberikan solusi. Meskipun begitu, DPR RI terutama komisi-komisi yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, perikanan, infrastruktur, energi, industri, kebencanaan, dan riset berkepentingan untuk membuat kebijakan guna mengatasi berbagai permasalahan lingkungan, baik melalui pelaksanaan fungsi legislasi, seperti menyusun RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, maupun melalui fungsi pengawasan dan anggaran untuk mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan.*

### Pendahuluan

Isu lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah sesuatu yang biasa. Sejumlah aktivis dan ahli sepakat bahwa situasi global terkait lingkungan hidup saat ini sangat mengkhawatirkan. Aktivitas pembangunan dan bisnis yang bersifat ekstraktif telah berkontribusi terhadap kenaikan suhu bumi dan menyebabkan

perubahan iklim, menjadi masalah nyata yang membutuhkan solusi konkret. Menurut kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi kerugian ekonomi yang ditanggung pemerintah Indonesia akibat perubahan iklim di Indonesia diperkirakan mencapai Rp544 triliun (Saputra, 2022). Oleh karena itu, isu



PUSAKA BKD



9 772088 235001

\* Analis Legislatif Ahli Madya, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: sri.qodriyatun@dpr.go.id.

lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam pilpres 2024.

Pilpres yang akan berlangsung 14 Februari 2024 merupakan kontestasi politik untuk memilih presiden baru yang akan menggantikan Joko Widodo. Presiden terpilih diharapkan mampu mengatasi masalah lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia saat ini. Dalam debat keempat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024, isu lingkungan hidup menjadi fokus utama. Melalui debat ini, masyarakat dapat mengetahui visi dan misi capres-cawapres yang akan mereka pilih.

Berdasarkan konteks tersebut, penulis mengkaji bagaimana isu lingkungan hidup menjadi fokus bahasan dalam pilpres 2024 dan apakah menjawab permasalahan lingkungan hidup Indonesia saat ini. Melalui kajian ini akan dapat diketahui isu lingkungan hidup yang diangkat pasangan capres-cawapres 2024 dan apakah sudah memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang saat ini Indonesia hadapi.

### **Masalah Lingkungan Hidup yang Dihadapi Indonesia**

Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan lingkungan hidup yang signifikan. *Pertama*, perubahan iklim yang telah menimbulkan dampak yang serius, seperti perubahan pola hujan dan kejadian iklim ekstrim; degradasi sumber daya lahan; gelombang panas ekstrem; peningkatan kebakaran hutan, kekeringan, banjir, dan kerusakan akibat topan; serta kenaikan permukaan laut (Hartono, 2023). *Kedua*, deforestasi dan degradasi hutan telah menyebabkan hilangnya 9,75 juta hektare hutan

primer antara tahun 2002–2020 dan menjadikan Indonesia sebagai negara kedua dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi setelah Brazil (“Indonesia Termasuk Negara,” 2021).

*Ketiga*, maraknya aktivitas *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing* atas sumber daya ikan Indonesia yang mengakibatkan beberapa jenis ikan sudah *fully-exploited* dan *over-exploited* di beberapa wilayah pengelolaan perikanan (WPP) (Aryanti et al., 2021, p. viii). *Keempat*, polusi udara yang terus meningkat yang menempatkan Indonesia pada peringkat keenam negara paling polusi dari 98 negara di seluruh dunia (Oktaviana, 2023).

*Kelima*, krisis air bersih karena pencemaran dan kekeringan, yang mengakibatkan 33 juta penduduk Indonesia hidup tanpa akses air minum yang memadai (WHO & UNICEF, 2017) dan 93,2% warga Indonesia tidak memiliki akses yang aman ke air bersih pada tahun 2018 (Purwanto, 2020). *Keenam*, masalah persampahan yang terus meningkat akibat penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, kurangnya kesadaran dalam memilah, dan kurangnya perhatian terhadap lingkungan, yang menimbulkan masalah di tempat pembuangan akhir (TPA). Di tahun 2023, tercatat 35 TPA di Indonesia terbakar (Pamela, 2023).

### **Isu Lingkungan Hidup dalam Pilpres 2024**

Dalam pilpres 2024, tiga pasangan capres-cawapres yaitu Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud, memasukkan

**Tabel 1.** Isu Lingkungan Hidup dalam Misi dan Agenda Pembangunan Capres-Cawapres 2024

Misi dan Agenda Pembangunan Capres-Cawapres 2024	
Anies-Muhaimin	Misi: (1) memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air; (2) mewujudkan keadilan ekologi yang berkelanjutan untuk generasi mendatang; (3) membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan. Agenda: penguatan tata kelola lingkungan hidup; pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT); mengembangkan ekonomi hijau ( <i>green economy</i> ); melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; mengatasi polusi air, udara, dan sampah; melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati; ketahanan terhadap bencana alam; kolaborasi pemangku kepentingan lingkungan dalam melakukan semua agenda tersebut.
Prabowo-Gibran	Misi: (1) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (2) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Agenda: menjamin pelestarian lingkungan hidup dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara; mempercepat pencapaian komitmen pencapaian target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target NZE GRK yang akan dilaksanakan melalui upaya penurunan jejak karbon ( <i>carbon footprint</i> ) dan jejak air ( <i>water footprint</i> ) untuk berbagai produk; serta pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari; dan menerapkan pembangunan berbasis ekonomi hijau.
Ganjar-Mahfud	Misi: (1) mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru; (2) mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah, salah satunya melalui kedaulatan pangan, termasuk di dalamnya industri pangan berkelanjutan dan lahan subur untuk petani. Agenda: mengurangi emisi GRK dari kehutanan, transportasi, industri, sampah; moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi hutan; revitalisasi DAS, danau, pengembangan kota hijau, industri hijau; mempercepat penyediaan air bersih merata; melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; menerapkan environmental, sosial, and governance (ESG) dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan; menerapkan program Kampung Sadar Iklim; menerapkan ekonomi hijau (transisi energi, desa mandiri energi, pengelolaan sampah, penerapan ekonomi sirkuler); menerapkan ekonomi biru (mengoptimalkan sektor kelautan, penangkapan ikan terkendali, peningkatan kapasitas SDM kelautan, mengembangkan industri maritim, mengembangkan wisata bahari, mengatasi pencemaran laut).

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 160 Tahun 2023

isu lingkungan hidup dalam visi misinya yang kemudian dituangkan dalam agenda pembangunan yang lebih detail (tabel 1). Namun, misi dan agenda pembangunan yang ditawarkan belum sepenuhnya memberikan solusi terhadap masalah lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi presiden, pemerintah ke depan

perlu melakukan beberapa upaya melalui pembangunan berkelanjutan dengan fokus solusi sebagaimana dituangkan dalam tabel 2. Berbagai upaya tersebut memerlukan kolaborasi berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan kalangan swasta.

**Tabel 2.** Pembangunan yang Perlu Dilakukan Pemerintah ke Depan

Masalah Lingkungan Hidup	Program Pembangunan Lingkungan Hidup ke Depan
Perubahan Iklim	Penguatan regulasi melalui RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim, mendorong pengurangan emisi GRK dari berbagai sektor penghasil, melakukan adaptasi dan mitigasi bencana, memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan, mengembangkan penelitian untuk menghasilkan solusi inovatif, mendorong kerja sama internasional untuk mengatasi perubahan iklim, menggalakkan partisipasi masyarakat dalam program-program lingkungan, mendorong penggunaan teknologi hijau dan inovatif, dan menyusun sistem monitoring yang efektif dan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah dilakukan.
Deforestasi dan degradasi lahan	Mengembangkan pengelolaan hutan berkelanjutan, rehabilitasi dan reforestasi, penegakan hukum terhadap praktik deforestasi ilegal dan perambahan hutan, membangun ekonomi lokal yang tidak bergantung pada pemanfaatan hutan yang berlebihan, me-ngadopsi teknologi untuk mengawasi deforestasi secara <i>real-time</i> , mendorong sektor swasta berinvestasi dalam praktik bisnis yang berkelanjutan, mengelola lahan gambut, menjalin kerja sama internasional dalam pengelolaan hutan dan pelestarian lahan, dan mendorong penelitian dan inovasi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
IUU <i>fishing</i>	Melakukan pengendalian penangkapan ikan, mendorong pengembangan akuakultur yang berkelanjutan, meningkatkan kawasan konservasi laut dengan melibatkan masyarakat lokal, meningkatkan pemahaman masyarakat akan keberlanjutan sumber daya laut dan peran masyarakat dalam menjaganya, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan melakukan monitoring dan evaluasi berkala.
Polusi udara	Pengendalian emisi industri, membangun transportasi ramah lingkungan, melakukan penyuluhan dan edukasi ke masyarakat, menggalakan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, menambah ruang terbuka hijau, penegakan hukum, dan menggalakkan kerja sama regional dan internasional untuk mengatasi polusi udara lintas batas.
Krisis air bersih	Mendorong investasi dalam pembangunan infrastruktur air bersih, mengelola sumber daya air (sungai, danau, mata air) yang ada supaya lestari, mendorong masyarakat berpartisipasi mengelola dan memelihara sumber air bersih, efisiensi penggunaan air, menyediakan alternatif air bersih, mengelola limbah industri dan perkotaan agar tidak mencemari sumber air, mempersiapkan rencana tanggap darurat mengatasi kekeringan dan bencana alam terkait air, mendorong kerja sama antar-pemerintah daerah dalam mengelola air bersih, dan mendorong penelitian dan inovasi dalam pengelolaan air yang berkelanjutan.
Persampahan	Mendorong pengelolaan sampah terpadu, kampanye kesadaran masyarakat, pengurangan plastik sekali pakai, pengelolaan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah organik, mene-rapkan <i>zero waste</i> , berkolaborasi dengan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, menggunakan teknologi canggih dalam pengelolaan sampah, dan penegakan hukum.

## Penutup

Isu lingkungan hidup menjadi salah satu isu krusial yang diangkat dalam pilpres 2024, yang tertuang dalam visi misi pasangan capres-cawapres. Akan tetapi, misi dan agenda pembangunan yang ditawarkan belum sepenuhnya memberikan solusi terhadap masalah lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia saat ini.

Terlepas dari itu, siapapun nantinya yang akan terpilih

menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, upaya pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan. DPR RI terutama komisi-komisi terkait yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, perikanan, infrastruktur, energi, industri, kebencanaan, dan riset, berkepentingan terhadap hal ini, baik melalui fungsi legislasi, seperti menyusun RUU tentang

Pengelolaan Perubahan Iklim, maupun fungsi pengawasan dengan mendorong pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan dan menguatkannya melalui fungsi anggaran. Melalui berbagai upaya tersebut, harapannya akan terwujud lingkungan hidup yang baik untuk generasi saat ini maupun masa mendatang.

### Referensi

- Apriyono, A. (2023, Desember 12). Sudahkah isu lingkungan jadi prioritas pembicaraan ketiga capres-cawapres. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/regional/read/5479075/sudahkah-isu-lingkungan-jadi-prioritas-pembicaraan-ketiga-capres-cawapres?page=2>
- Aryanti, D., Safitri, P.A., Hidayat, F., Limayani, N., Pragesari, N.N. (2021). *Statistik sumber daya laut dan pesisir 2021*. Krismawati, D. Aryanti, P.A. Safitri (Ed). Badan Pusat Statistik.
- Hartono, D. (2023). Perubahan iklim dan dampaknya pada Indonesia. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 170–183.
- Indonesia termasuk pembabat hutan terbanyak, Menteri LHK: 'Pembangunan era Jokowi tidak boleh berhenti atas nama deforestasi'. (2021, November 3). BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59151007>
- Oktaviana, A.Y. (2023, Agustus 23). Data polusi udara di Indonesia 2015-2023, penyebab, dan dampaknya. *Tirto.id*. <https://tirto.id/info-data-polusi-udara-di-indonesia-pada-2015-2023-penyebabnya-gPhD>
- Pamela, D. A. (2023, Desember 29). 35 TPA terbakar sepanjang 2023, KLHK usul TPA dijadikan objek vital. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5493149/35-tpa-terbakar-sepanjang-2023-klhk-usul-tpa-dijadikan-objek-vital>
- Purwanto, E.W. (2020). Pembangunan akses air bersih pascakrisis covid-19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. 4(2), 207–214.
- Saputra, D. (2022, Januari 9). Bappenas: Dampak perubahan iklim timbulkan kerugian Rp544 triliun. *Ekonomi.Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220109/9/1486874/bappenas-dampak-perubahan-iklim-timbulkan-kerugian-rp544-triliun>
- WHO & UNICEF. (2017). *Progress on drinking water, sanitation, and hygiene 2017 update SDG baseline*. World Health Organization (WHO) and the United Nations Children's Fund (UNICEF).